



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDDY AMARULLAH**
2. Jabatan : **WAKIL WALIKOTA**
3. NHK : **759709**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.119.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
2. Tanah Seluas 4899 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/38 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 287.000.000
9. Tanah Seluas 5873 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000
10. Tanah Seluas 5823 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000
11. Tanah Seluas 5835 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 87.500.000
12. Tanah Seluas 17017 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL



SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.200.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA/MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI

Rp. 90.000.000

2. MOBIL, HONDA BRIO / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

88.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 84.200.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 41.632.229**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.423.532.229**III. HUTANG** Rp. 195.928.216**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.227.604.013

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.